

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa ialah suatu kawasan yang ditempati atau dihuni suatu kumpulan masyarakat yang mempunyai tingkat kepadatan rendah. Didalam sistem pemerintahan, desa merupakan tingkatan paling rendah pada sistem pemerintahan di bawah kecamatan. Unsur yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan desa meliputi wilayah, penduduk dan pemerintahan. Jumlah seluruh desa diindonesia diketahui ada 81.616 desa yang terbagi di 38 provinsi diindonesia. Di provinsi jambi sendiri terdapat 1.375 desa yang tersebar di 11 kabupaten. Pada setiap desa terdapat pemimpin yang dikepalai oleh kepala desa dan dipilih secara langsung oleh masyarakat dan diangkat oleh bupati. Didalam peraturan masa jabatan suatu kepala desa yaitu enam tahun dalam satu periode dan jika terpilih lagi dipemilihan berikutnya suatu kepala desa bisa menjabat selama 3 periode atau selama 18 tahun. peraturan tersebut tertera di Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa.¹

Didalam menjalankan tugasnya dipemerintahan desa, setiap desa mendapatkan anggaran dari pemerintahan pusat, di dalam penyaluran dana yang didapatkan desa terdapat dua mekanisme penyaluran dana yakni mekanisme tranfer anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dari kas umum negara serta tahapan mekanisme transfer anggaran pendapatan desa dari kekas desa. didalam Undang-Undang No 6 tahun 2014, maksud dari

¹ Edy Sutrisno, Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2017.),Hlm. 22

disalurkan dana ke desa ialah sebagai bentuk kepedulian negara dalam membangun desa maju, kuat, dan demokratis. dari dana tersebut diharapkan dapat menciptakan pembangunan desa yang baik dan pemberdayaan warga desa yang maksimal dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat.²

Pembangunan desa merupakan suatu proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan sebagai pengembang kemandirian. Dengan itu pengembangan kemandirian ini diharapkan dapat menaikkan pendapatan desa, dengan adanya kenaikan pendapatan desa maka bisa menghasilkan kesejahteraan masyarakat sebagai usaha untuk menjauhi warga pedesaan pada kemiskinan yang kerap terjadi di masyarakat pedesaan.³

Berkaitan pada pembangunan desa, masih banyak masalah yang sering dijumpai pada desa di Indonesia yang harus perlu mendapat perhatian lebih agar diantisipasi dan dilakukan tindakan, diantaranya memanfaatkan potensi-potensi desa, kurangnya ketersediaan SDM di desa yang baik dan profesional, terbatasnya sumber pembiayaan di desa yang memadai, baik secara internal ataupun, belum tersusunnya kelembagaan sosial ekonomi di desa yang mampu berperan secara efektif untuk pembangunan desa, belum adanya sistem serta regulasi yang jelas, tidak adanya penginformasian laporan

² *ibid*

³ N. Gregory Mankiw, Makro Ekonomi. Terjemahan: Yati Sumiharti, Imam Nurmawan, (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2000), 127.

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. serta kurangnya integritas dalam pembangunan desa.⁴

Salah satu bentuk permasalahan yang dapat mempengaruhi pembangunan desa adalah pengangguran. Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah utama makro ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah masalah sosial lainnya.

Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicitakan. pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja.⁵

Diprovinsi Jambi jumlah angka pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 5.13%, pada tahun 2021 jumlah angka pengangguran 5.09 % dan pada tahun 2022 jumlah angka pengangguran 4.59% dari data tersebut dapat dilihat dalam tiga tahun terakhir angka pengangguran di provinsi jambi terbilang masih

⁴ Yeni Dharmayanti, "Analisis Pengaruh PDRB Upah dan Inflasi Terhadap Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991-2009" (Skripsi--FE Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 23.

⁵ Desi Fitriani, "Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kota Bndung" (studi Kasus: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Pada Bidang Pelatihan Dan Produktipitas Tenaga Kerja), 2015, Hlm. 6.

tinggi dalam hal ini akan mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan di provinsi Jambi.⁶

Salah satu desa di provinsi jambi yang mengalami permasalahan pengaguran yaitu di desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro jambi, Provinsi Jambi. Pengangguran dalam pembangunan ekonomi di desa tersebut. Masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius.

Tabel 1.1
Jumlah Data Tingkat Pengaguran (Persen) Tahun 2020-2022 Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

No	Desa / Kelurahan	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Dusun Mudo	10	12	11
2	Kemingking Dalam	7	9	8,7
3	Kemingking Luar	8	6	9
4	Kunangan	12	15	20
5	Manis Mato	5	8	6
6	Rukam	9	12	10
7	Sekumbang	10	10	12
8	Talang Duku	10	11	9
9	Tebat Patah	8	7	9
10	Teluk Jambu	6	5	9

Sumber Data: Kantor Kecamatan Taman Rajo

⁶ Sumber Data BPS Provinsi Jambi

Dari table diatas dapat dilihat jumlah data tingkat pengangguran di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dapat dikategorikan masih terbilang tinggi terutama pada Desa Kunangan dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah pengangguran serta menjadi desa dengan jumlah pengangguran terbanyak di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Selain itu berdasarkan data awal yang penulis dapatkan anggaran belanja desa kunangan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.236.000.000 digunakan untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 126.000.000 dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebesar Rp. 27.000.000, Pada Tahun 2021 Sebesar Rp. 1.127.000.000 Digunakan Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sebesar Rp. 96.000.000 Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebesar Rp. 30.000.000 Dan Pada Tahun 2022 Sebesar Rp. 1.349.000.000 Digunakan Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sebesar Rp. 139.000.000 Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 32.000.000. dalam penggunaan dana desa tersebut dapat dikatakan belum efektif dalam mengatasi jumlah angka pengangguran di desa kunangan.⁷

Seharusnya Berdasarkan Permendesa Nomor 11 tahun 2019, menjelaskan didalam Pasal 5, yaitu, ayat (1) menjelaskan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada ayat

⁷ Hasil Wawancara dengan Sekdes Desa Kunangan.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa: a. peningkatan kualitas hidup; b. peningkatan kesejahteraan; c. penanggulangan kemiskinan; dan peningkatan pelayanan publik.

Sehingga dapat dilihat berdasarkan aturan tersebut pihak pemerintah desa seharusnya melakukan prioritas penggunaan dana desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu didalam Pasal 6 Ayat (2), Permendesa Nomor 11 tahun 2019 menjelaskan: Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk: membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan; menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan; meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

Dapat dilihat dari penjabaran aturan Pasal 6 Ayat (2) Huruf (b), Permendesa Nomor 11 tahun 2019 , menjelaskan bahwa pemerintah desa dalam Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, berperan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan rakyat miskin di desa tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat masih banyaknya warga kunungan yang tidak bekerja jika di persentasekan ada sekitar 20 persen dari warga desa kunungan yang masih belum mendapatkan pekerjaan beberapa factor yang mempengaruhi dan menjadi alasan mengapa angka pengangguran menjadi tinggi di desa kunungan antara lain, Dari segi masyarakat, Tingginya

pertumbuhan jumlah tenaga kerja, Kurangnya keahlian yang dimiliki masyarakat, Kurangnya modal jika ingin membuka usaha individu dan Tidak memiliki standarisasi jenjang pendidikan yang jelas. Dari segi pemerintah Desa, Kurangnya program pengembangan keahlian dalam masyarakat. Swayada Desa yang terkesan tidak ada pengembangan dan Kurang memperdasayakan masyarakat desa.

Berdasarkan dari Permendesa Nomor 11 tahun 2019 peran pemerintah desa merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan dalam menanggulangi tingginya angka pengangguran yang ada didesa tersebut sesuai dengan amanat dalam aturan yang telah penulis sampaikan. Peran pemerintahan desa dalam mungurangi pengangguran sangat dibutuhkan untuk menambah lapangan pekerjaan masyarakat desa kunangan. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Beberapa sumber penelitian yang masih berhubungan dengan . Peran pemerintahan desa dalam mungurangi pengangguran antara lain Khodijah Ishak, SH.I, M.E.Sy, didalam penelitian berjudul *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinya terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia”*, menjelaskan tentang Pengangguran di

Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang merupakan suatu masalah yang mendesak yang harus segera dipecahkan karena dampak pengangguran itu akan sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial adalah fakta bahwa berbagai kejahatan sosial seperti pencurian/penodongan/perampokan, pelacuran, jual beli anak, anak jalanan dan lain-lain merupakan dampak dari pengangguran. Di lihat dari dampaknya yang luas terhadap tatanan kehidupan sosial, pengangguran telah menjadi kuman penyakit sosial yang relatif cepat menyebar, berbahaya dan berisiko tinggi menghasilkan korban sosial yang pada gilirannya menurunkan kualitas sumber daya manusia, martabat dan harga diri manusia. Karena itulah maka melalui strategi komunikasi pembangunan, kebijakankebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat ditekan/dikurangi. Dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pengangguran, maka penyebab dari berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat saat ini dapatdikurangi. Berbagai masalah sosial perkotaan yang meresahkan masyarakat saat ini berakar dari kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ketiadaan sumber hidup (pekerjaan)⁸

Selain itu Sugianto , Yul Tito Permadhy (2020) didalam penelitian berjudul, *“Faktor Penyebab Pengangguran Dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten”* menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya

⁸ Khodijah Ishak, SH.I, M.E.Sy, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinyaterhadap* *Indek* *Pembangunan* *Di* *Indonesia*,<https://ejournal.stiesyariah bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/121/121>

pengangguran salah satunya dari sisi pendidikan, tidak memiliki keterampilan yang memadai, lapangan kerja yang minim pada daerah tersebut dan keterbatasan menerima informasi.⁹

PA Wijaya · 2020 , didalam penelitian berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran dan Urbanisasi Pemuda di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah*”, menjelaskan tentang permasalahan yang kerap terjadi di desa adalah masalah pengangguran dan urbanisasi di kalangan pemuda desa, hal tersebut terjadi di kalangan pemuda Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengangguran dan urbanisasi di kalangan pemuda Desa, adapun beberapa faktor tersebut yakni (1) tidak melanjutkannya pemuda desa ke jenjang perguruan tinggi sesuai menyelesaikan pendidikan menengah atas, (2) ketidakmauan para pemuda untuk bekerja di sektor pertanian meskipun sebagian besar memiliki orang tua yang mayoritas bekerja sebagai petani, (3) minimnya lapangan kerja di desa, (4) keinginan dan tekad kuat untuk bekerja di kota. Terkait dengan alasan utama pemuda Desa Tamansari tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yakni karena faktor masalah ekonomi keluarga yang tidak memadai untuk membiayai ke jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya terkait dengan ketidakmauan para pemuda untuk bekerja di sektor pertanian

⁹ Sugianto , Yul Tito Permadhy (2020, *Faktor Penyebab Pengangguran Dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten*, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/download/583/435/>

meskipun sebagian besar memiliki orang tua yang mayoritas bekerja sebagai petani karena sektor pertanian di Desa Tamansari tidak mampu memberikan jaminan masa depan yang lebih baik, karena kecilnya penghasilan yang diperoleh dari sektor pertanian¹⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zuhaiqi (2020), didalam penelitian berjudul “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat*”, Pemerintah Desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.¹¹

Yoga Hariyanto, S. F. (2021), didalam penelitian berjudul “*Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*”, menjelaskan tentang peran pemerintah desa dalam pembangunan. Peran menjadi indikator awal berhasil tidaknya seorang kepala desa dan perangkat desa dalam

¹⁰ PA Wijaya · 2020 , didalam jurnal tentang “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran dan Urbanisasi Pemuda di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah*”
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/24503/15434>

¹¹ ZUHAQIQI (2020), *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat*.

melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut. macetnya suatu pembangunan desa disebabkan pemerintah desa belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan perangkat desa lainnya, kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa atau kepala desa.¹²

Widya Praja,(2021), didalam penelitian berjudul “*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”, menjelaskan bahwa Potensi kekayaan alam didalam lingkup demografis suatu wilayah tersebut seharusnya mampu dikembangkan dan dikelola secara maksimal untuk sebesar-besarnya memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

Dalam penelitian Partini H (2018), didalam penelitian berjudul” *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*”, dapat disimpulkan bahwa anggaran dana desa bila dilakukan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya dimulai dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan

¹² Yoga Hariyanto, S. F. (2021), *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*, Vol. 5 No. 2 (2021): December 2021

¹³ Widya Praja,(2021), didalam jurnalnya tentang *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* Volume 47, No. 1, Juni 2021: 67-79

pembangunan, pengawasan pembangunan sampai dengan pelaporan hasil pembangunan secara baik, maka akan membantu dalam penunangan pemberdayaan desa tersebut.¹⁴

Nirmala (2018), didalam penelitian berjudul “*Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*” tahapan perencanaan dilihat dari proses musrembang yang di adakan oleh pemerintahan desa masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat desa kadingeh dimana penggunaan anggaran dana desa dapat terselesaikan dengan baik dan sudah optimal namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa kepada masyarakat , sehingga pencapaian tujuan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan kurang efektif.

lexy dan Selvie (2021) didalam penelitian berjudul, “*Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Made Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmaera utara Juliana, yang membahas tentang peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi masyarakat di kawasan desa made*”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat desa made oleh pemerintah dan permasalahan tentang pemberdayaan masyarakat diantaranya

¹⁴ Partini H (2018), *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*

kurang memadai atau tidak meratanya pembagian bantuan serta peranan pemerintah desa tidak maksimal yang disebabkan tupoksi dari aparat-aparat pemerintah desa yang tidak diketahui. kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti peran pemerintahan desa dalam meningkatkan potensi lokal masyarakat, sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini fokus pada meningkatkan potensi lokal untuk mungurangi pengangguran, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Pada penelitian Susi Iswanti dan Zulkarnaini (2022) didalam penelitian berjudul “*peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi lokal salah satunya yaitu objek wisata*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata pulau tilan belum bisa dikatakan maksimal. kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama ingin meneliti peran pemerintah desa dalam meningkatkan potensi lokal masyarakat, sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian yang dimana penelitian ini dapat meningkatkan potensi lokal untuk mungurangi pengangguran, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada pengembangan potensi lokal yaitu objek wisata.¹⁶

¹⁵ Lexy, Selvie, *Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Made Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmaera utara Juliana*, dalam jurnal holistik (Maluku utara: Halmaera utara, 2021), hal 15

¹⁶ Susi Iswanti, Zulkarnaini, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*, dalam jurnal Ilmu Administrasi Publik (Kabupaten Rokan Hilir:Universitas Riau, 2022), hal11. Vol.8 No 1

Sedangkan pada Penelitian Ahmad rochim(2018 didalam penelitian berjudul “*peran pemerintahan desa dalam pengembangan potensi lokal yaitu desa wisata Pujon Kidu*”¹. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa Pujon Kidul mendapat tantangan tentang infrastruktur meliputi jalan, akses, sistem komunikasi, dan promosi serta daya saing yang masih kurang baik. kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan potensi lokal desa, sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini fokus pada meningkatkan potensi lokal untuk mungurangi pengangguran, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada pengembangan desa wisata.¹⁷

Beberapa literatur penelitian terdahulu tadi dapat dikelompokkan dalam tiga kategori tentang peranan pemerintah desa dalam menanggulangi pengangguran. . Lebih lanjut lihat tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Ringkasan Hasil Tinjauan Pustaka

No	Kategori Pengelompokan	Hasil / Temuan
1	Alasan Peningkatan Jumlah Pengaguran	K Ishak · (2018), PA Wijaya · (2020), Y Yacoub · (2022) Dapat disimpulkan dari beberapa hal yang ditemukan bahwa meningkatnya jumlah pengguran

¹⁷ Ahmad Rochim, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul*, dalam skripsi Ilmu Administrasi (kabupaten Magelang: universitas Brawijaya, 2018), Hal 132

		<p>disebabkan menunggu panggilan terhadap lamaran kerja yang di ajukan atau sedang tidak mencari kerja karena beranggapan tidak ada kesempatan kerja yang tersedia untuk dirinya walaupun dia sanggup. Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung.</p>
2	<p>Peranan Pemerintah Desa Dalam penggunaan investasi masuk dan berbagai kebijakan lainnya yang mendukung tenaga kerja lokal</p>	<p>Ahmad rochim, (2018) Zuhaqiqi (2020), Yoga Hariyanto, S. F. (2021), Widya Praja,(2021) Dapat disimpulkan bahwa upaya telah dilakukan oleh masing-masing pemerintahan diseluruh dunia dimulai dari memperbaiki iklim investasi agar investasi masuk dan berbagai kebijakan lainnya yang mendukung tenaga kerja lokal tetapi masalah ini tetap juga tidak berhasil dipecahkan</p>

3	Penggunaan Anggaran Desa	PARTINI H (2018), NIRMALA (2018), Lexy dan Selvie, (2021), Susi Iswanti, Zulkarnaini (2022) Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan.
---	--------------------------	--

Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan table diatas penelitian sebelumnya terfokus kepada, Peranan Pemerintah Desa Dalam penggunaan investasi masuk dan berbagai kebijakan lainnya yang mendukung tenaga kerja local, Penggunaan Anggaran Desa. Namun belum ada yang secara konferhensif membahas tentang pengangguran. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih terfocus mengenai, Peran pemerintahan desa dalam mungurangi pengangguran dan aturan baru tentang pengelolaan Desa dengan melibatkan masyarakat guna untuk menekan jumlah pengangguran didesa tersebut. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih dalam **Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelesan dalam latar belakang rumusan masalah menunjukkan bahwa, Desa kunangan pada Tahun 2020-2022 merupakan desa yang memiliki angka pengangguran tertinggi sekecamatan Taman Rajo sedangkan desa kunangan memiliki anggaran desa yang belum di gunakan dengan baik untuk pemberdayaan masyarakat khususnya dalam penanggulangan pengangguran , maka penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mungurangi pengangguran ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat yang dialami pemerintah desa dalam mungurangi angka pengangguran di Desa tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencapai tujuan agar peneliti dapat

1. memberikan manfaat sesuai peranan pemerintah desa dalam mungurangi pengangguran di desa Kunangan
2. mengetahui kendala yang dialami pemerintah desa dalam mungurangi pengangguran di desa kunangan.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Manfaat teoritis

Dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan dan referensi pada bidang ilmu Pemerintahan terutama mengenai peranan pemerintah desa dalam mungurangi pengangguran.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi, pemikiran dan pertimbangan dalam melakukan penggunaan dana desa guna mensejahterakan masyarakat desa tersebut.

1.5 Landasan Teori

1. Konsep Kinerja Pemerintah

a. Pengertian Kinerja Pemerintah

Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan¹⁸

Sementara itu Prawirosentono mengartikan kinerja (performance) adalah sebagai Kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.¹⁹

Pengertian Kinerja Aparatur instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi

¹⁸ Desi Fitriani, “Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kota Bndung” (studi Kasus: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Pada Bidang Pelatihan Dan Produktipitas Tenaga Kerja), 2015, Hlm. 6.

¹⁹ *Ibid*

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program, kebijakan yang ditetapkan.²⁰

Definisi kinerja instansi pemerintah menurut keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan selain itu Kinerja pemerintah didalam PP Nomor 8 Tahun 2006 sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat di gambarkan bahwa Kinerja aparatur pemerintah merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

b. Penilaian Kinerja Pemerintah

Sesuai dengan definisi kinerja yang mengemukakan kinerja sebagai hasil kerja dan perilaku seseorang dalam suatu periode. Maka, kinerja sebagai hasil perlu di evaluasi untuk mengetahui apakah

²⁰ *Ibid*

kinerja sesuai dengan standar yang di inginkan.proses evaluasi ini dikenal dengan istilah penilaian kinerja. kinerja tentu perlu di evaluasi atau di nilai. Penilaian kinerja merupakan proses merencanakan, mengorganisasi, mensupervisi, mengontrol dan menilai kinerja.²¹

Dick Grote menyatakan “penilaian kinerja sebagai sistem manajemen formal untuk menyediakan evaluasi tentang kualitas kerja seseorang dalam sebuah organisasi”.²²

Kasmir mengemukakan “penilaian kinerja sebagai sebuah sistem yang dilakukan secara periodik untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja individu sehingga mampu memberikan manfaat bagi pemberian kompensasi dan pengembangan karir karyawan”.²³

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat di simpulkan bahwa penilaian kinerja pemerintah merupakan proses meninjau dan mengevaluasi kinerja individu didalam pemerintah desa secara periodic.

Kinerja aparatur pemerintah yang optimal di ukur menurut Agus Dwiyanto tahun 2002 dengan:

1. Produktivitas tidak hanya mengukur efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan produktivitas pada umumnya di pahami sebagai rasio antara input dan output, tetapi saat ini

²¹ *Ibid*

²² Etri Maesari, “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Guna Penanggulangan Pengangguran Kota Bandar Lampung dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi pada UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung pada Tahun 2011-2015)”,Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Program StudiEkonomi Syari’ah, 2017, hlm.78-83

²³ *Ibid*

konsep produktivitas menjadi lebih luas yaitu memasukan seberapa besar pelayanan public memberikan hasil yang di harapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penitng.²⁴

2. Kualitas Layanan saat ini menjadi isu penting pada organisasi publik. Banyak pandangan negative yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang di terima oleh organisasi public. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat di jadikan indikator kinerja organisasi public.²⁵
3. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsiveness menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Organisasi yang memiliki responsiveness rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang buruk.²⁶
4. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilakukan sesuai dengna prinsip prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang ekplisit maupun implicit. Oleh sebab itu,

²⁴ Dwiyanto, A. dkk, Reformasi Birokrasi di Indonesia, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan dan Kebijakan, UGM, 2002, hal. 22.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

responsibilitas kadang kala bisa berbenturan dengan responsivitas.²⁷

5. Akuntabilitas public menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kinerja organisasi public tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target, tetapi juga harus di lihat dari ukuran eksternal seperti nilai nilai dan norma norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan organisasi public memiliki akuntabilitas tinggi kalau kegiatan itu di anggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.²⁸

Indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah menurut Bastian di antaranya sebagai berikut:

1. Masukan (inputs) Masukan adalah semua jenis sumber daya yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input dibagikan menjadi dua yaitu input primer dan input sekunder. Input primer berupa kas sedangkan input sekunder adalah berupa bahan baku, personel, infrastruktur dan masukan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

2. Keluaran (outputs) Keluaran adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. Hasil (outcome) Outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Pengukuran outcome adalah pengukuran dampak sosial suatu aktivitas. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, peningkatan efektivitas dan peningkatan pendapatan.
4. Manfaat (benefit) Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut akan kelihatan setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal, yaitu tepat lokasi dan tepat waktu.
5. Dampak (impact) Indikator dampak memberikan gambaran mengenai efek langsung atau tidak langsung yang dihasilkan dari tercapainya tujuan program. Dampak merupakan outcome pada

tingkat yang lebih tinggi hingga batas tertentu. Indikator ini mengukur outcome yang lebih makro.²⁹

2. Konsep Pengangguran

a. Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar Tenaga Kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta..³⁰

b. Klasifikasi Pengangguran

Pengangguran dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab dan cirinya. berdasarkan dari penyebab pengangguran dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengangguran konjungtural, pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi.

²⁹ Bastian, "Akuntansi Sektor Publik: suatu pengantar", Erlangga, Jakarta, 2010, hal 20.

³⁰ Lexy, Selvie, *Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Made Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmaera utara Juliana*, dalam jurnal holistik (Maluku utara: Halmaera utara, 2021, hal 7-8

2. Pengangguran siklikal, adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja, yang disebabkan dari kondisi geografis, informasi, dan dari proses perekrutan yang panjang.
3. Pengangguran struktural, adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian yang umumnya negara berusaha dalam mengembangkan perekonomian dalam pola agraris ke industri.
4. Pengangguran musiman, keadaan menganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur.
5. Pengangguran teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena penggunaan mesin dan kemajuan teknologi. Hal ini ditimbulkan dari adanya pergantian negara manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia.
6. Pengangguran siklus; pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi.³¹

Pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian juga tidak mendapat penghasilan, dan yang tidak berpenghasilan tidak dapat membelanjakan uang untuk membeli barang kebutuhan hidup.

³¹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 230-231

Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk bagi diri penganggur dan keluarganya. Bila jumlah penganggur banyak, pasti akan menimbulkan kekacauan sosial dan politik, mungkin juga kriminal. Tingkat produksi yang sebenarnya bisa diraih tidak tercapai, pertumbuhan ekonomi terhambat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat merosot.

c. Dampak Pengangguran

Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek dimana dua aspek tersebut yaitu:

1. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh

karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

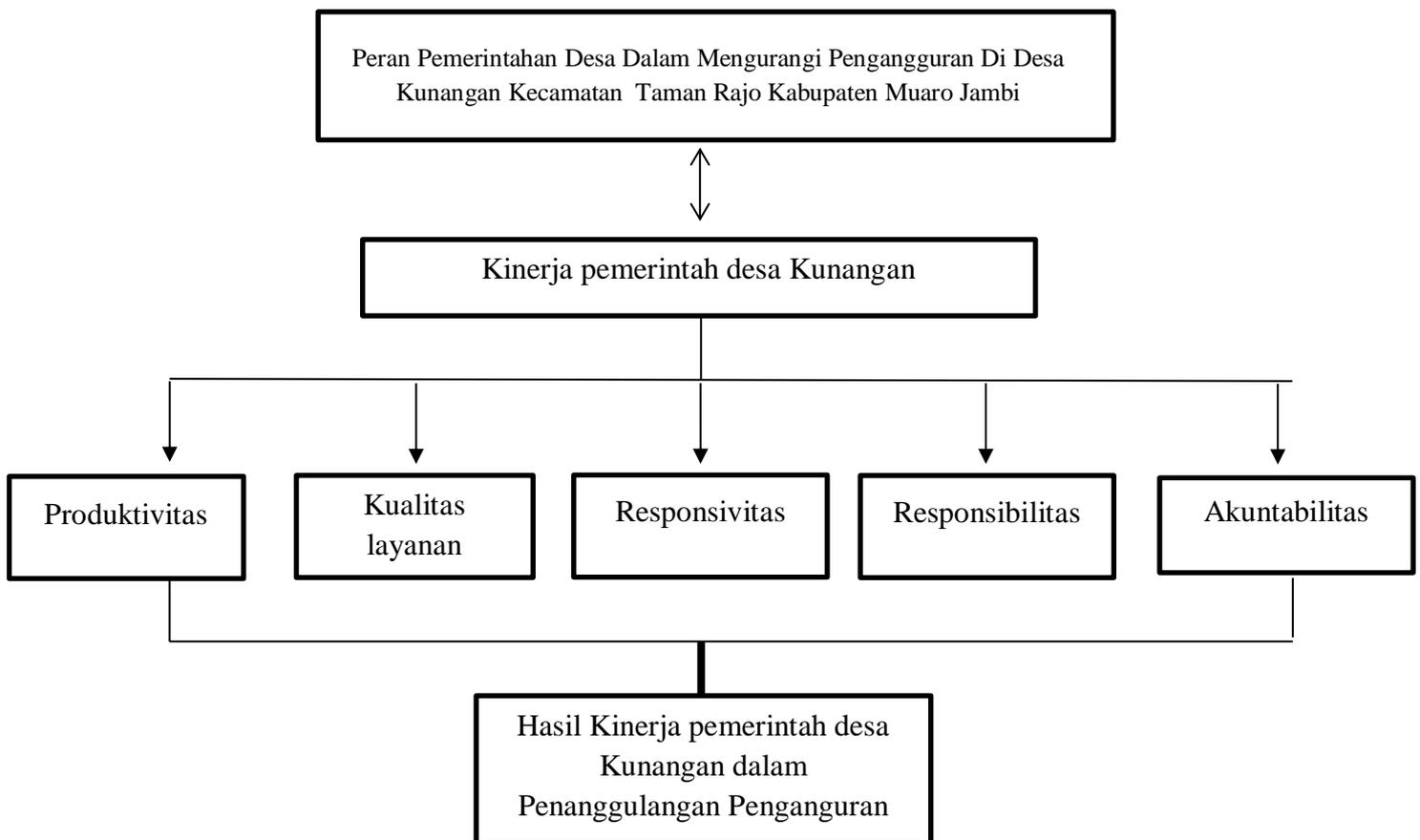
- 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
 - 3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan keuntungan kelesuan berkurang. Kegiatan Keuntungan perusahaan yang rendah menyebabkan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi.
2. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah :
- 1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan.

- 2) Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah.³²

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang serta landasan teori dalam penelitian ini, maka secara detail akan terlihat pada kerangka berfikir dibawah ini:

GAMBAR 1.1
Kerangka Pikir



³² Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 514

1.7 Metode penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha memberikan pemecahan masalah dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan secara lebih luas pada berbagai masalah.³³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus yang dimana dapat dilakukannya pemeriksaan komprehensif terhadap seseorang, kelompok, organisasi, program kegiatan, dll. selama periode waktu tertentu. Deskripsi yang komprehensif dan mendalam dari suatu entitas adalah tujuannya. Studi kasus menghasilkan data yang dapat diperiksa lebih lanjut untuk mengembangkan teori. Sama halnya dengan metodologi pengadaaan informasi pemeriksaan subyektif, informasi analisis kontekstual diperoleh dari pertemuan, persepsi, dan berkas-berkas.³⁴ Penggunaan pendekatan kualitatif, dengan mempertimbangkan kemungkinan data. berbasis fakta yang dikumpulkan di lapangan yang membutuhkan analisis mendalam. Ketika peneliti sendiri terlibat di lapangan, pendekatan kualitatif akan mendorong pengumpulan data yang lebih mendalam. Ketika melakukan penelitian kualitatif, peneliti mengambil peran sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data yang

³³ Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hal 4

³⁴ Supardi, *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) Hal 28

mungkin memiliki hubungan langsung dengan instrumen atau subjek penelitian.³⁵

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah dilaksanakannya penelitian. Penelitian ini dilaksanakan tepatnya terletak di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi. Lokasi ini dipilih sebagai obyek penelitian karena memiliki informasi mengenai kinerja Pemerintah desa dalam mengatasi penganguran. , yang menarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam mengatasi penganguran di desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muara jambi, Provinsi Jambi
- b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung dalam pengurangan penggaوران desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muara jambi, Provinsi Jambi

1.7.3 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama, sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan untuk memperoleh data sedetail dan seluas mungkin selama kegiatan penelitian di lapangan. Secara

³⁵ Sugiyono, Memahami Penelitian, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hal 2

keseluruhan, kehadiran peneliti diharapkan dapat melihat secara lebih mendalam detail permasalahan yang diteliti dilapangan.

1.7.4 Sumber data

Sumber data penelitian adalah indikator penting yang menjadi sumber penting dalam penentu metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yang terdiri dari, Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dari sumber asli atau narasumber untuk memperoleh data dan informasi yang valid. Sumber data sekunder merupakan bahan penunjang untuk mempelancar penelitian ini. Data sekunder dapat dihasilkan dari buku-buku, catatan desa.

1.7.5 Teknik Penentu Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini memakai teknik *purposive sampling* atau penentuan sampel secara sengaja menurut ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang dimaksud pada penelitian ini yaitu informan yang mengetahui tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan potensi lokal desa, serta faktor penghambat dan pendukung dalam mengurangi pengangguran di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi. Informan yang ingin diwawancarai antaranya kepala desa kunangan, sekretaris desa kunangan, kaur pembangunan desa kunangan, tokoh masyarakat desa kunangan, masyarakat umum desa kunangan.

1.7.6 Teknik pengumpulan data

a. Wawancara adalah aktivitas tanya jawab secara lisan antara peneliti dan informan. Teknik wawancara dilakukan untuk mewawancarai informan secara lisan mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan potensi lokal desa, serta faktor penghambat dan pendukung lokal di Desa kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi.

1. Kepala Desa di Desa kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi dipilih menjadi narasumber wawancara penulis dikarenakan sebagai kepala daerah di desa kunangan.
2. Sekertaris Desa di Desa kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi dipilih menjadi narasumber wawancara penulis dikarenakan beliau mengetahui dan memahami data yang dapat menunjang penelitian penulis.
3. Kepala Dusun di Desa kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi dipilih menjadi narasumber wawancara penulis dikarenakan penyambung bagi penulis kepada masyarakat dan mengetahui program yang dijalankan oleh desa.
4. Masyarakat di Desa kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi dipilih menjadi narasumber wawancara penulis dikarenakan menjadi penerima manfaat

langsung dari program desa khususnya dalam penanganan permasalahan pengangguran.

- b. Dokumentasi merupakan salah satu cara mendapatkan data atau informasi untuk kemudian di telaah yang bisa mendukung pemenuhan data kepenulisan. Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Sumber data primer dan sumber data sekunder diolah menggunakan model analisis data interaktif tiga tahapan yang dilakukan secara bersamaan pertama melakukan Kondensasi data (data condensation), penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi,³⁶ yaitu:

- a. Reduksi data: Data-data yang diperoleh peneliti dari narasumber dikelompokkan berdasarkan kebutuhan penelitian selanjutnya memilih data manasaja yang sesuai dengan indikator penelitian
- b. Penyajian data: data yang telah dikelompokkan sebelumnya disajikan sesuai kebutuhan penelitian

³⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 218-219

- c. Menarik kesimpulan (verifikasi) Penarikan kesimpulan dan juga verifikasi dilakukan sesuai dengan memastikan kebenaran data yang diperoleh di lapangan sehingga validitasnya dapat terjamin.